**TATA KELOLA PARIWISATA PANTAI KETAPANG DI DESA SUNGAI
CINGAM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2017 – 2018**

Oleh: Arwita Idayu

idayuarwita@gmail.com

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M,si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research entitled " Tourism Govenance Ketapang Beach In The Villages Of Sungai Cingam In The Rupal District Of Bengkalis District In 2017-2018" This research was motivated by the existence of Minister of Home Affairs regulation number 10 of 2009 about tourism which explains that tourism is a variety of tourism activities and is supported by various facilities and services provided by the community, businessmen, government, and local government. As for the formulation of the problem in this study is "how is the tourism Govenance Ketapang Beach In The Villages Of Sungai Cingam In The Rupal District Of Bengkalis District In 2017-2018".The method used in this study is a qualitative method that describes data descriptively. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. whereas, the source of the data used is the primary data obtained from the location of the study in the form of research informants and subsequently supported by secondary data in the form of data documents.The results of this study indicate that The results of this study indicate that tourism management in the Village of Sungai Cingam has not run optimally according to the principles of good tourism governance. This is because the achievement of each principle has not been fully fulfilled. These factors include the activeness and synergy of stakeholders not yet fully realized, partnerships only reach the level of the village government and the partnership has not been widely felt and has not been able to encourage local ownership, training programs that have not been implemented, public aspirations are still general, promotion is still minimal and stands individually, as well as guidelines for monitoring and evaluating tourist attractions are still simple without any special indicators to measure the impact of tourism activities carried out.

Keywords: Tourism, Government, Private Sector, Society

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Keragaman dan keunikannya serta kekayaan dan keragaman budaya berperan sebagai sumber devisa negara, selain itu juga mempunyai daya tarik dalam sektor pariwisata alam (*ecotourism*). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Bab I, Pasal I, Ayat 3). Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia

Dalam system pariwisata, ada banyak factor yang berperan dalam mengerakkan system. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insane pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. selanjutnya dalam kelompok swasta adalah

asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, Negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

Kabupaten Bengkalis sebagai daerah otonomi memiliki wewenang untuk mengelola beragam objek wisata yang kaya dan berpotensi bagi perkembangan pariwisata khususnya di Kecamatan Rupat yang memungkinkan untuk dikembangkan melalui kerjasama bisnis dan investasi di sektor pariwisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2015 yang menyebutkan bahwa Pulau Rupat dijadikan kawasan pariwisata dan agribisnis.

Desa Sungai Cingam Salah Satu desa di pulau Rupat yang Memiliki Potensi Alam yang sangat Strategis yang langsung berbatasan dengan selat Melaka (Malaysia) yaitu pantai Ketapang yang panjangnya Mencapai $\pm$ 5.000 M dan merupakan tempat Wisata yang selalu di kunjungi oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luar. Pantai di desa Sungai Cingam salah satu pantai yang menjadi harapan penduduk desa untuk dijadikan tempat wisata karena memiliki potensi yang sangat besar. Pantai yang terbentang luas tersebut merupakan objek wisata alam yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemanfaatan sumber daya alam memiliki beberapa makna penggunaan potensi alam local dalam

pembangunan desa, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan kelembagaan pengelolaan local dalam Badan Usaha Milik Desa. Dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan Desa Sungai Cingam maka berdasarkan Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 2 Tahun 2017 maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cingam Jaya, yang mana BUM Desa Cingam Jaya ini diberi wewenang langsung oleh Kepala Desa untuk mengelola serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di Pantai Ketapang, dalam hal ini Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam membantu proses pengelolaan dan pengembangan potensi wisata Pantai Ketapang.

Jumlah Pengunjung Pantai Ketapang Tahun 2017-2018

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
1.	2017	4374
2.	2018	4718
		Jumlah 9092

Sumber : Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Cingam Jaya 2018

Dalam perkembangannya, pengelolaan wisata Pantai Ketapang sudah mulai mendapat perhatian dari masyarakat sekitar dan pemerintah dalam hal pengelolaan pengembangan kepariwisataan. Melihat objek wisata pantai ketapang sebagai daya tarik yang ada di Desa Sungai Cingam ini perlu adanya proses keberlanjutan pembangunan dan pengembangan

dalam pengembangan wisata sehingga dapat lebih mengundang wisatawan untuk datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tata kelola pariwisata Pantai Ketapang Di Desa Sungai Cingam upaya pengelolaan wisata masih terdapat fenomena-fenomena yang muncul dalam proses pertumbuhan produk dan pasar wisatanya. Adapun fenomena-fenomena terkait pelaksanaan tata kelola pariwisata Pantai Ketapang tersebut antara lain :

1. Belum adanya manajemen pengelolaan potensi wisata oleh BUM Desa Cingam Jaya sebagai Badan pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah Desa Sungai Cingam dalam pengelolaan objek wisata Di Desa Sungai Cingam, sebagai acuan kerja jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini terjadi disebabkan minimnya pengetahuan dan skill dalam perencanaan pengelolaan objek wisata di Desa Sungai Cingam.
2. Belum optimalnya keterlibatan dari seluruh *Stakeholders*, seperti keterlibatan dari pihak pemerintah daerah, pihak swasta/pelaku bisnis dan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut dapat terfokus dan terencana. Mengingat pentingnya tata kelola kepariwisataan yang baik dalam pengelolaan objek wisata untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yakni :

1. Bagaimana ketercapaian tata kelola kepariwisataan yang baik Di Pantai Ketapang Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018?
2. Mengapa ketercapaian tata kelola kepariwisataan yang baik Di Pantai Ketapang Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018 belum berhasil?

KERANGKA TEORI

1. Tata Kelola Kepariwisata

Soewarno mengemukakan bahwa “pengelolaan adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran”. Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas sumber daya atau objek yang bersifat hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya saya berdayaguna agar mencapai sasaran yang diinginkan

2. Tata Kelola Kepariwisata yang Baik

Bambang Sunaryo mengemukakan bahwa: prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu

dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/ industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait. Selanjutnya Bambang Sunaryo menjelaskan bahwa secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya good tourism governance akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM lembaga swadaya syarakat bidang pariwisata, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata , asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Kemitraan

Kepemilikan lokal pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat. Setempat usaha fasilitas penunjang kepariwisataan serta hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang strategis.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Secara berlanjut pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (irreversible) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan Diperbaiki dengan menggunakan Kriteria kriteria dan standar standar internasional yang sudah baku.

5. Monitor dan Evaluasi

Program kegiatan monitor dan evaluasi dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

6. Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan

pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin dengan jenis dalam kegiatan yang tercermin dengan jelas dalam kegiatan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.

7. Pelatihan pada Masyarakat

Terkait pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara vocational dan professional.

8. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan jalan penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap (*sense of place*) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah informan yang memberikan informasi pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

3,1 Partisipasi Masyarakat Terkait dalam Tata Kelola Objek Wisata Di Desa Sungai Cingam

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan model yang relevan dalam pelaksanaan program tersebut. Model dipandang sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program. Sebagai sebuah pendekatan, model yang dirumuskan harus merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam setiap aspeknya.

a. Peran Pemerintah dalam Partisipasi masyarakat Di Desa Sungai Cingam

Peneliti menilai adanya partisipasi masyarakat pada objek wisata pantai ketapang telah dimulai sejak pembentukan BUM Desa Cingam Jaya sebagai pengelola yang di tunjuk langsung oleh pemerintah desa untuk mengelola pantai ketapang. Berdasarkan anggaran rumah tangga BUM Desa Cingam Jaya kewajiban masyarakat desa dalam penyelenggaraan BUM Desa cingam jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUMDesa;
- b. Menghormati hak warga desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUMDesa
- c. Turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa.

Namun kurangnya partisipasi berupa sumbangan pemikiran mengenai keberlanjutan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang. Apabila ditinjau dari pelaksanaan suatu program pengembangan pariwisata, objek wisata Pantai Ketapang tidak di dukung dengan pengetahuan memadai tentang tata kelola pariwisata. Sedangkan kemampuan untuk berpartisipasi merupakan salah satu unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi.

b. Partisipasi Masyarakat Desa Sungai Cingam

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata Di Desa Sungai Cingam salah satunya dapat dilihat pada kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti kegiatan tahunan acara mandi safar, tahun baru, libur hari raya idul fitri dan idul adha masyarakat selalu dilibatkan. Selanjutnya masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan Di Pantai Ketapang. Hal ini terlihat kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan usaha-usaha yang sudah disediakan oleh pemerintah desa dan BUM Desa Cingam jaya seperti banana boat, sewa pelampung dan gerai BUM Desa Cingam Jaya.

c. Peran Swasta dalam Partisipasi Masyarakat

Peran swasta dalam partisipasi masyarakat terkait tata kelola pariwisata Di Desa Sungai Cingam dalam konteks yang luas dan lebih besar terkait dalam pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat

belum terlihat Di Pantai ketapang. Swasta disini yang terlihat hanya pedagang kecil-kecilan yang menjual kebutuhan makanan ringan yang dibutuhkan wisatawan.

3.2 Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan hendaknya terlibat secara aktif dan produktif dalam upaya pembangunan keparwisataaan. Pelaku disini meliputi seluruh pihak yang berpengaruh dan berkepentingan serta menerima manfaat dari kegiatan pariwisata. Sesuai dengan paparan teoritis dari Sunaryo tersebut, sehingga dalam tata kelola objek wisata di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis para pemangku kepentingan tentu harus terlibat dalam seluruh proses demi tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan tata kelola keparwisataaan yang baik. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan Di Desa Sungai Cingam dapat dilihat sebagai berikut :

a. Keterlibatan Pemerintah

Pemerintah yang terlibat dalam tata kelola Pariwisata Pantai ketapang Di Desa Sungai Cingam adalah pemerintah desa. Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten dan Provinsi dari dinas pariwisata belum terlihat terlibat dalam pengelolaan Pantai Ketapang ini. Pemerintah Desa Sungai Cingam bersama BUM Desa mengelola Pantai Ketapang ini agar dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan akses sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengembangan oleh BUM Desa ini sangat penting. Pengelolaan wisata Pantai Ketapang oleh BUM Desa mengingat banyak sekali peran BUM

Desa yang dapat membantu pengembangan wisata supaya bisa bersaing dengan wisata-wisata lainnya. BUM Desa bermanfaat menjadi pintu masuk mengelola potensi pariwisata Desa.

b. Keterlibatan Masyarakat Sungai Cingam

Keterlibatan masyarakat Desa Sungai Cingam terlihat dalam kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Sungai Cingam seperti kegiatan rapat tahunan, gotong royong, kebersihan Pantai, perbaikan akses jalan menuju pantai ketapang. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam menjalankan usaha yang telah disediakan oleh BUM Desa Cingam Jaya diantaranya penyewaan pelampung, karcis tempat masuk dan pengendara banana boat.

c. Keterlibatan Pihak Swasta

Pihak swasta dalam tata kelola Pantai Ketapang hanya sebatas pedagang yang terlihat disekitar Pantai Ketapang yang menjual minuman dan makanan yang dibutuhkan pengunjung. Namun keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli dalam membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan belum ada terlibat dalam pengelolaan ini.

3.3 Kemitraan

Kemitraan yang diterapkan dalam tata kelola objek wisata Pantai ketapang ini harus mempunyai konsep yang jelas dan memberikan manfaat masyarakat sekitar. Kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi sangat krusial dan dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata tersebut. Dalam hal ini kemitraan yang terjalin di Desa

Sungai Cingam adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah

Pemerintah Desa Sungai Cingam dalam pengelolaan Pantai Ketapang, memberi wewenangnya kepada BUM Desa untuk mengelola wisata Pantai Ketapang. Pemerintah Desa memberikan wewenang ini agar BUM Desa Cingam Jaya bisa mengelola secara indenpenden dan masyarakat bisa terlibat dan turut aktif mengembangkannya. Aktor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pantai Keapang ini adalah pemeritah desa bersama BUM Desa Cingam Jaya. Sejauh ini hubungan kerjasama pemerintah desa dengan BUM Desa Cingam jaya sangat baik. Terlihat pada pengelolaan Pantai Ketapang, semua kegiatan yang dilakukan BUM Desa Cingam Jaya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah desa. Walaupun BUM Desa diberikan izin dan kewenangan tetapi harus melalui rekomendasi dari pemerintah desa.

b. Swasta

Kemitraan yang ada dalam pengelolaan Pantai Ketapang bersama swasta belum mampu mendorong munculnya kepemilikan lokal dari berbagai usaha fasilitas penunjang wisata di Pantai Ketapang. Terbatasnya fasilitas yang ditawarkan pada objek wisata Pantai Ketapang tersebut turut menghambat ketertarikan investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usahanya di Pantai Ketapang. Peran pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata tidak lantas hanya terbatas sebagai motivator, namun diperlukan upaya dari pemerintah daerah kabupaten Bengkalis untuk dapat memfasilitasi para investor dan pengusaha serta

masyarakat. Swasta yang masih aktif terlihat di Pantai Ketapang yang bermitra dalam pengelolaan Pantai Ketapang hanya sebatas pedagang-pedagang makanan dan minuman ringan. Peran pedagang ini untuk ikut serta berkerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat juga sangat terbatas. Para pedagang hanya mampu berkerja sama dalam hal menjaga kebersihan pantai dan menjaga keamanan Pantai Ketapang. Terkait kerjasama langsung dalam memajukan pengelolaan Pantai Ketapang belum terlihat dan dilaksanakan oleh para pedagang. Namun, dari para pedagang ini punya kesadaran diri untuk ikut serta memajukan pengelolaan Pantai Ketapang bersama pemerintah desa dan masyarakat yang bisa menarik investor lain dalam berkontribusi memajukan pengelolaan Pantai Ketapang untuk masa yang akan datang.

c. Masyarakat

Pada pengelolaan Pantai Ketapang tersebut, kurangnya campur tangan pihak swasta dalam membangun fasilitas penunjang kepariwisataan, membuat masyarakat Desa Sungai Cingam belum mampu menunjang kepemilikan local dari usaha yang ada Di Pantai Ketapang.

3.3 Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pada pengelolaan Pantai Ketapang, peran stakeholder dalam pemanfaatan sumber daya secara berlanjut adalah sebagai berikut :

a. Pihak pemerintah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pada prinsip pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, pemerintah desa Sungai Cingam selalu memperhatikan

manfaat yang berkelanjutan. Segala kegiatan selalu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan Pantai Ketapang. Hal tersebut terlihat tempat gazebo, mushola, gerai-gerai untuk disewakan, spot-spot foto, dan kamar mandi selalu dijaga dan dilakukan gotong royong untuk selalu terjaga kebersihannya. Sehingga tempat-tempat yang ada bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dan bisa memberi kenyamanan bagi pengunjung yang mengunakannya.

b. Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Dalam pariwisata Pantai Ketapang, Masyarakat Desa Sungai Cingam selalu mengawasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah desa supaya menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Umumnya pekerja pada wisata Pantai Ketapang berasal dari masyarakat sendiri yang diberdayakan oleh BUM Desa Cingam Jaya untuk mengurus sejumlah sarana pariwisata Di Pantai Ketapang. Dalam mengurus sarana pariwisata yang telah disediakan oleh BUM Desa Cingam Jaya seperti gazebo, mushola, gerai untuk disewakan, dan kamar mandi. Masyarakat selalu menjaganya dan membersihkan serta memliharanya agar tetap bersih dan nyaman saat digunakan oleh pengunjung. Selain menjaga kelestarian Pantai Ketapang, masyarakat Sungai Cingam juga selalu mengawasi perkembangan pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar selalu menjaga kelestarian lingkungan supaya Pantai Ketapang

tetap dengan keasriannya dalam jangka waktu yang panjang sebagai pariwisata yang bisa diunggulkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Pantai Ketapang.

c. Peran Swasta dalam Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Dalam pembangunan yang berkelanjutan menekankan pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terganggunya lingkungan dalam pencemaran yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Peran pihak swasta sangat menentukan pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan mencemarkan lingkungan itu sendiri. Di Pantai Ketapang lingkungan yang masih sangat asri dan alami yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan untuk datang berkunjung ke wisata tersebut. Sehingga pihak swasta pantai ketapang yaitu para pedagang selalu menjaga kebersihan lingkungan Pantai. Sampah-sampah yang dihasilkan dari penjualan makanan dan minuman oleh para pedagang selalu dibersihkan dan menjadi tanggung jawab oleh pedagang itu sendiri. Sehingga sampah tersebut tidak menumpuk yang bisa mencermarkan lingkungan.

3.3 Monitor dan Evaluasi

Monitoring merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara rutin dan secara obyektif digunakan untuk menilai (evaluasi) tingkat kemajuan pada sebuah program/kegiatan . Dengan kegiatan monitoring kita dapat memantau setiap perubahan dengan berfokus pada proses dan keluaran. Tentu dengan melibatkan perhitungan-perhitungan

terhadap program yang sedang dijalankan. Melalui monitoring kualitas setiap program atau kegiatan dapat kita nilai untuk kemudian kita tingkatkan pada program selanjutnya atau program di tempat lain. Berbeda dengan monitoring. Evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan dengan menggunakan hasil monitoring sebagai sumber rujukan utama. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya program kegiatan. Penilaian harus dilakukan seobyektif dan sesistematis mungkin dengan membandingkan realisasi Rangkaian kegiatan masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

a. Peran Pemerintah dalam Monitor dan Evaluasi

Pada pengelolaan Pantai Ketapang monitor dan evaluasi yang mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, pengembangan indikator atau batasan dalam mengukur pelaksanaan monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan hingga evaluasi dampak kegiatan pariwisata, belum terlaksana dan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah hanya tergabung dalam rapat tahunan pertanggung jawaban BUM Desa.

b. Peran Masyarakat dalam Monitor dan Evaluasi

Dalam pengelolaan pariwisata Pantai Ketapang dalam tahap monitor dan evaluasi masyarakat Desa Sungai Cingam dalam mengikuti rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BUM Desa Cingam Jaya hanya beberapa masyarakat yang mengikuti. Sehingga kegiatan monitor dan evaluasi

berkaitan dengan pengelolaan pantai ketapang belum optimal terlaksana. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata Pantai Ketapang belum sepenuhnya terlaksana. Seharusnya dengan pelibatan masyarakat sejak awal akan lebih menjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat, kesesuaian dengan kapasitas yang ada, serta menjamin adanya komitmen masyarakat karena adanya rasa memiliki yang kuat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam evaluasi dan monitoring, sehingga masyarakat yang hadir hanya perwakilan dari RT, RW, Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Selebihnya dalam rapat monitoring dan evaluasi hanya dihadiri staf-staf pemerintahan dan pengelola BUM Desa. Kemudian perwakilan masyarakat yang hadir hanya mengikuti rapat musyawarah tersebut tanpa banyak mengeluarkan ide dan pendapat untuk pengelolaan Pantai Ketapang. Masyarakat yang ada hanya sekedar ikut mendengarkan dan menyetujui apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan kesadaran masyarakat itu sendiri menjadi penghambat pengelolaan pariwisata di Pantai Ketapang.

c. Peran Swasta dalam Monitor dan Evaluasi

Peran swasta dalam proses monitor dan evaluasi dalam pengelolaan wisata Pantai Ketapang belum ada terlibat. Rapat musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh BUM Desa tidak

melibatkan dan mengundang pihak swasta. Rapat tersebut hanya melibatkan pemerintah desa sebagai pengawas, masyarakat dan pengelola BUM Desa itu sendiri.

3.4 Akuntabilitas Lingkungan

Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparat pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkan. Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak di eksplorasi secara berlebihan

a. Peran Pemerintah dalam Akuntabilitas Lingkungan

Pada prinsip akuntabilitas lingkungan di Pantai Ketapang yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Cingam yaitu dengan cara melestarikan bahkan mengawasi Pantai Ketapang itu sendiri. Namun untuk ketercapaian dari prinsip akuntabilitas lingkungan itu sendiri di pantai ketapang ini secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam kaitannya dengan poin kebermanfaatan bagi kualitas manusia dan lingkungan masyarakat, khususnya menyangkut kebermanfaatan sosial dan ekonomi, penyelenggaraan tata kelola Pantai Ketapang masih belum mampu

memberikan pengaruh yang besar dan luas untuk masyarakat sekitar. Hal tersebut terhambat oleh belum adanya pondasi yang kokoh dan jaringan kerjasama yang luas dalam penyelenggaraan tata kelola objek wisata tersebut, sehingga aktivitas wisata yang dilakukan di Pantai Ketapang itu sendiri masih sangat minim. Disamping itu masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan di Pantai ketapang masih terbatas pada masyarakat tertentu. Dalam hal ini meskipun sudah terdapat organisasi yang mengelola wisata Pantai, namun belum dirasakan kebermanfaatan kegiatannya bagi masyarakat.

b. Peran Masyarakat dalam Akuntabilitas Lingkungan

Masyarakat Desa Sungai Cingam dalam menjaga lingkungan Pantai Ketapang baik lingkungan fisik, sosial maupun ekonomi dan budaya. Mereka selalu mengedepankan kegotongroyongan dan kebersamaan dalam menjaga destinasi wisata tersebut. Selanjutnya nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada dalam masyarakat Sungai Cingam selalu dipertahankan. Selain menjaga akuntabilitas lingkungan agar tetap terjaga, hal ini sebagai timbal balik bagi wisatawan yang datang dengan pelayanan yang baik juga dari masyarakat.

c. Peran Swasta dalam Akuntabilitas Lingkungan

Pada tata kelola pariwisata Di pantai Ketapang, pihak swasta yang terkait yaitu pelaku usaha selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan wisata tersebut. Hal ini dibuktikan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan Pantai Ketapang tersebut.

3.7 Pelatihan pada Masyarakat

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya yang potensial. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan yang berkaitan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Prinsip pelatihan pada masyarakat terkait dalam *Good Tourism Governance* dapat diukur dengan melihat ada atau tidaknya program pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait kepariwisataan.

a. Peran Pemerintah dalam Pelatihan Masyarakat

Secara keseluruhan prinsip pelatihan terhadap masyarakat terkait kepariwisataan tidak terlihat telah diselenggarakan pada objek wisata Pantai ketapang di Desa Sungai Cingam. Pemerintah daerah yang dalam hal ini merujuk pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis belum menerapkan program pelatihan bagi masyarakat terkait, pelatihan kepariwisataan hanya pernah diberikan kepada pemerintah desa bentuk seminar ataupun *workshop* dan bukan kepada masyarakat desa Sungai Cingam.

b. Peran Masyarakat dalam Pelatihan Pariwisata

Pelatihan masyarakat pada desa yang mempunyai potensi wisata sangat diperlukan guna menunjang manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dilingkungan wisata itu sendiri. Pelatihan pariwisata terhadap masyarakat dimaksudkan untuk

memenuhkan kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM di industry pariwisata. Dengan peran SDM yang memahami pengembangan pariwisata menjadi factor yang paling penting dalam menentukan kenyamanan dan kepuasan para wisatawan. Pengelolaan pelatihan pariwisata pada masyarakat Sungai Cingam belum dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat Sungai Cingam dalam kesadaran dan kepekaan terhadap kepariwisataan di Desa Sungai Cingam sangat rendah.

3.7 Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Salah satu upaya pengembangan pariwisata adalah dengan melakukan promosi dan penyebarluasan informasi. Pada skala yang paling kecil, upaya promosi yang bisa dilakukan adalah oleh wisatawan itu sendiri. Pengalaman menyenangkan yang didapatkan selama beraktifitas wisata kemudian menyebar kemasyarakat lain. Sehingga lokasi wisata yang didatangi tersebut lebih dikenal dengan masyarakat luas. Bentuk promosi yang dilakukan masing-masing stakeholder di Pantai Ketapang adalah sebagai berikut :

a. Pihak pemerintah

Pemerintah Desa Sungai Cingam melakukan berbagai bentuk promosi, memanfaatkan media sosial diantaranya web, spanduk dan ikut dalam program inovasi desa. Kemudian berkerjasama dengan anak KKN Tematik dalam membuat Blogger www.sosiologi.info yang berisi tentang informasi terkait dengan wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai cingam.

b. Pihak Masyarakat

Masyarakat Desa Sungai Cingam dalam mempromosikan Pantai Ketapang dengan seringnya berkunjung dan berfoto-foto mengambil momen-momen yang ada Di Pantai Ketapang kemudian mereka Upload ke media sosial facebook, instagram dan youtube. Dari kiriman foto-foto dan video yang dibagikan masyarakat di media sosial inilah yang membuat pantai ketapang lebih dikenali dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Ketapang tersebut.

c. Pihak Swasta

Swasta dalam mempromosikan Pantai Ketapang yaitu para pedagang yang menjual kaos-kaos yang bertemakan Pantai Ketapang. Hal ini bertujuan semakin banyak kaos-kaos dengan tema Pantai Ketapang terjual, sehingga semakin luas ketertarikan orang yang penasaran dengan wisata tersebut. Selain sebagai cendera mata untuk dibawa pulang, kaos-kaos yang dijual pedagang dengan tema pantai ketapang menarik minat masyarakat untuk selalu berkunjung ke Pantai Ketapang.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Prinsip *tata kelola kepariwisataan yang baik* dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam sudah diterapkan, namun penerapannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ketercapaian masing-masing prinsip dalam *tata kelola kepariwisataan yang baik* belum seluruhnya terpenuhi. Adapun penyelenggaraan tata kelola objek wisata di Desa Sungai Cingam diukur

berdasarkan prinsip *tata kelola kepariwisataan yang baik* penerapannya masih belum optimal yaitu yang pertama dalam prinsip partisipasi masyarakat terkait, hanya masyarakat tertentu yang aktif berpartisipasi dan partisipasinya masih tergolong dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa belum terkait partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan. Kedua prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, pihak pemerintah dan masyarakat belum mampu menarik investor pihak swasta dalam pengelolaan Pantai Ketapang.

Prinsip yang ketiga kemitraan hanya sampai ketinggian pemerintah desa dan kemitraannya belum dirasakan secara luas dan belum mampu mendorong kepemilikan local. Keempat pemanfaatan sumber daya secara berlanju masih dilaksanakan dalam tahap yang sederhana dalam mencegah pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Kelima pedoman *monitoring* dan evaluasi objek wisata masih sederhana tanpa ada indicator khusus guna mengukur dampak dari kegiatan wisata yang dilakukan. Keenam akuntabilitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta yaitu menjaga lingkungan Pantai Ketapang agar tetap terjaga keasriannya. Ketujuh mengakomodasikan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat yang masih bersifat umum dan yang terakhir promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan masih minim dan berdiri sendiri-sendiri.

4.2 Saran

1. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah kabupaten Bengkalis dan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam ini.
2. Kemitraan dengan pihak swasta perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Masyarakat desa Sungai Cingam hendaknya lebih aktif dalam menyuarakan aspirasinya, dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan objek wisata perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damanik , Janianton. 2015. *Membangun Pariwisata dari Bawah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamaroesid ,Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muljadi A.J. 2014.*Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pitana , I Gde & Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Pitana, I Gde. 2015. *Sosiologi Pariwisata (Kajian sosiologis terhadap struktur, system, dan dampak-dampak pariwisata)*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Sabarguna, Boy S. *Analisis data pada penelitian kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sumodiningrat , Gunawan.2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sunaryo, Bambang. 2013.*Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sutoro, Eko, Dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaruan Desa (Fppd).
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zakaria, Gusman. 2017. *Revolusi Mental*. Jakarta : Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2011 tentang RPJM
- Permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang BUM Desa
- Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2017 tentang Peraturan Badan Usaha Milik Desa Cingam jaya.

Skripsi

- Kartini. 2016. *Pengelolaan Kawasan Wisata Hutan Zamrud oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013-2015*. Ilmu Pemerintahan. Fisip. Universitas Riau.
- Maiwa, Ildha. N. 2016. *Pengelolaan Destinasi Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2014-2015 (Studi Objek Wisata Danau Singkarak)*. Ilmu Pemerintahan. Fisip. Universitas Riau.
- Nur rika puspita sari. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo De Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kawah Ijen Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi*.
- Made Heny Urmila Dewi. 2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. Vol. 3 No. 2.
- Nyoman Sukma Arida. 2017. *Pariwisata Berkelanjutan Relasi Desa Dan Investor*.
- Setiyo Utomo. *Pengembangan Desa Wisata Eramaya Kabupaten Temanggung Studi Kerjasama Pemerintah & Masyarakat*.
- Wulan, Tunjung. 2013. *Identifikasi Potensi dan Masalah Desa Wonosoco dalam Upaya Pengembangan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kudus*. Volume 1 Nomor 1.

Jurnal

- Dimas. 2017. *Peran Masyarakat Desa Senakin Dalam Pengelolaan Wisata Riam Solaking Sebagai Kawasan Wisata Alam Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Jurnal Hutan Lestari*. vol 5.
- Dyanita Nawangsari. 2018. *Jurnal Pengembangan Wisata Pantai Desa Watu Karung Dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan Tahun 2017*, Vol. 4 No. 1.
- I Made Cahya Baskara. *Partisiapsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Subaksuwakayah Ubud*.
- Ira Puspita Sandy. 2016. *Alternative Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengembangan Kawasan Wisata*